


| | | | |
|---|---|--|-------------------------|
|  | Nomor Alumni Universitas : | YULIA RIZKI ASNITA | Nomor Alumni Fakultas : |
| | a) Tempat/Tanggal Lahir: Padang/15 Februari 1993 b) Nama Orang Tua: Syafrizal dan Asnizar c) Fakultas: Hukum d) PK: Hukum Internasional (VII) e) BP: 1110112111 | f) Tanggal Lulus : 27 Januari 2016 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,75 i) Lama Studi : 4 Tahun 5 Bulan j) Alamat: Jalan Adinegoro No.40 Lubuk Buaya RT 01 RW 03, 25173 Padang | |

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT ASPEK HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI : KASUS DUGAAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA OLEH PEMERINTAH BASHAR AL ASSAD DI SURIAH)

(Yulia Rizki Asnita, 1110112111, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 104+vii Halaman, 2016)

ABSTRAK

Pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata sangat rentan terjadi, di mana terdapat indikasi penyalahgunaan kekuasaan berupa negara berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas pelanggaran tersebut. Seperti konflik bersenjata di Suriah yang menelan banyak korban sejak tahun 2011, ditemukan identifikasi pelanggaran HAM oleh pasukan pemerintah Bashar Al Assad. Di sini, penulis membahas bagaimana pengaturan hukum humaniter internasional mengenai pelanggaran HAM, tinjauan yuridis dan konsekuensi atas dugaan pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata oleh pemerintah Suriah. Metoda penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Normatif dengan meneliti kepustakaan atau data sekunder. Data utama yaitu *Report of Independent International Commission of Inquiry on The Syrian Arab Republic* disertai konvensi-konvensi terkait HAM dan Hukum Humaniter. Kesimpulan dari pembahasan permasalahan di atas menunjukkan bahwa pemerintah Bashar Al Assad benar telah melakukan pelanggaran HAM yang tergolong kepada kejahatan perang (*war crimes*) berdasarkan Pasal 8 Statuta Roma yang merujuk kepada Konvensi Jenewa 1949. Karena pelanggaran yang dilakukan pemerintah tersebut bersifat aktif dan pasif, maka konsekuensi yang seharusnya didapatkan oleh rezim ini tidak hanya dari segi hukum, melainkan juga dari segi politis. Maka dari itu, untuk menjawab keadilan, maka penulis merumuskan saran agar segera kasus ini diadili dalam ranah hukum pidana internasional yaitu diajukan ke peradilan yang tepat untuk diadili dan pemerintah Bashar Al Assad segera diganti dengan pemerintahan baru yang demokratis.

Kata Kunci :

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada 27 Januari 2016. Abstrak ini telah disetujui oleh pembimbing dan penguji:

Penguji,

| | | |
|--------------|--------------------------------|------------------------------|
| Tanda Tangan | 1. | 2. |
| Nama | Dr. Mardenis, S.H.,M.Si | Delfiyanti, S.H., M.H |

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara: **Hj.Magdariza,S.H.,M.H**

Tanda Tangan

Alumni telah mendaftar ke Fakultas /Universitas dan mendapat nomor alumni:

| | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------|
| | Petugas Fakultas/Universitas | |
| Nomor Alumni Fakultas : | Nama : | Tanda Tangan : |
| Nomor Alumni Universitas : | Nama : | Tanda Tangan: |

**PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONFLIK BERSENJATA
MENURUT ASPEK HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI :
KASUS DUGAAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA OLEH
PEMERINTAH BASHAR AL ASSAD DI SURIAH)**

(Yulia Rizki Asnita, 1110112111, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 104+vii

Halaman,2016)

ABSTRAK

Pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata sangat rentan terjadi, di mana terdapat indikasi penyalahgunaan kekuasaan berupa negara berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas pelanggaran tersebut. Seperti konflik bersenjata di Suriah yang menelan banyak korban sejak tahun 2011, ditemukan identifikasi pelanggaran HAM oleh pasukan pemerintah Bashar Al Assad. Di sini, penulis membahas bagaimana pengaturan hukum humaniter internasional mengenai pelanggaran HAM, tinjauan yuridis dan konsekuensi atas dugaan pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata oleh pemerintah Suriah. Metoda penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Normatif dengan meneliti kepustakaan atau data sekunder. Data utama yaitu *Report of Independent International Commission of Inquiry on The Syrian Arab Republic* disertai konvensi-konvensi terkait HAM dan Hukum Humaniter. Kesimpulan dari pembahasan permasalahan di atas menunjukkan bahwa pemerintah Bashar Al Assad benar telah melakukan pelanggaran HAM yang tergolong kepada kejahatan perang (*war crimes*) berdasarkan Pasal 8 Statuta Roma yang merujuk kepada Konvensi Jenewa 1949. Karena pelanggaran yang dilakukan pemerintah tersebut bersifat aktif dan pasif, maka konsekuensi yang seharusnya didapatkan oleh rezim ini tidak hanya dari segi hukum, melainkan juga dari segi politis. Maka dari itu, untuk menjawab keadilan, maka penulis merumuskan saran agar segera kasus ini diadili dalam ranah hukum pidana internasional yaitu diajukan ke peradilan yang tepat untuk diadili dan pemerintah Bashar Al Assad segera diganti dengan pemerintahan baru yang demokratis.